

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Menurut Hannie (2017) dalam undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-masing (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Menurut Rai (2012), tugas utama dari pemerintah daerah adalah mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola

pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat

Dalam melaksanakan mengelola keuangan daerah, tugas yang wajib dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan laporan kinerja keuangan daerah. Menurut Hannie (2017), Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Berdasarkan keterangan undang-undang diatas terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan pertanggung jawaban secara berkala dan menyeluruh. Kinerja keuangan instansi menjadi sorotan masyarakat yang semakin kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Menurut Sutrisno (2012), Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 pasal 20 dan digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Menurut Armstrong dan Baron (2012), pengukuran kinerja keuangan adalah suatu strategi dan pendekatan terpadu untuk menghasilkan keberhasilan yang berkelanjutan pada suatu organisasi dengan peningkatan kinerja dan orang-orang yang bekerja didalamnya dengan mengembangkan kapabilitas kontribusi baik secara tim maupun individu.

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan suatu cara sistematis untuk mengevaluasi input, output, transformasi dan produktivitas dalam suatu

operasi manufaktur maupun non manufaktur. Menurut Rai (2012), Sebagai bagian dan sistem akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/16/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai kemajuan organisasi perlu dilakukan perbaikan kinerja.

Kabupaten Balikpapan merupakan salah satu kabupaten teladan di Indonesia. Balikpapan merupakan salah satu kabupaten dengan pertumbuhan yang sangat pesat di semua sektor. Sektor pendidikan, pariwisata, budaya dan sektor lainnya dapat berkembang dengan sangat pesat. Hal ini membuat Kabupaten Balikpapan mendapat penghargaan dari banyak sektor. Balikpapan mendapat penghargaan Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award ke 19 tahun 2021 mewakili Indonesia. Disisi lain dalam laporan tahunan di kabupaten ada beberpa program kerja yang belum berjalan, salah satu faktornya belum berjalannya secara penuh pengukuran kinerja program (LAKIP, 2018)

Menurut Sudarman (2017) fenomena kegagalan pengukuran kinerja sering muncul sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para pengelola pemerintahan sering mempunyai anggapan bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap

anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat memaksimalkan anggaran dengan hasil. Meskipun banyak yang telah dicapai dari pelaksanaan program tetapi masih berada jauh di bawah target.

Kabupaten Balikpapan memiliki beberapa kerja yang masih perlu di maksimalkan. Misalnya dalam menganalisa masalah aspek guru honorer yang belum selesai terkait dengan masalah gaji dan tunjangan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Balikpapan yaitu masalah transportasi, pembangunan jalan tol, pemakaian kendaraan pribadi, masalah sampah di Balikpapan, dan masalah banyaknya jumlah penduduk tetap maupun tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kinerja Kabupaten Balikpapan sangat baik, tetapi masih ada fenomena perbedaan tertentu yang membutuhkan perbaikan secara berkala dan evaluasi yang menyeluruh kepada seluruh program yang telah dilaksanakan. Salah satu solusinya adalah dengan mengukur hasil output dan input dari aspek ekonomis dan efisiensi (Baron, 2017)

Pemerintah Kabupaten Balikpapan memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Pemerintah Kabupaten Balikpapan sering dinilai hanya dari aspek *input* dan *output*. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program (*output*), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*) diperlukan ukuran nonfinansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor public (Sudarman, 2017)

*Value For Money* sebagai salah satu teori pengukuran kinerja keuangan memuat tiga aspek utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ketiga aspek dalam *value for money* tersebut dapat mengukur secara mendalam tentang hasil program kerja daerah dari segi *input* dan *output*, kesesuaian anggaran dan capaian kinerja.

Analisa ekonomis dan efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Penelitian ini merupakan replika peneleitian (Nugrahani Tri Siwi, 2007). Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu di Jogjakarta sedangkan penelitian ini di Kabupaten Balikpapan. Berdasarkan latar belakan diatas maka penelitian ini mengambil judul **Analisis Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Kabupaten Balikpapan Periode Tahun 2018-2020.**

## 1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Balikpapan Periode tahun 2018-2020 ditinjau dari aspek ekonomis?



2. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Balikpapan Periode tahun 2018-2020 ditinjau dari aspek efisiensi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Balikpapan Periode tahun 2018-2020 ditinjau dari aspek ekonomis
- b. Mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Balikpapan Periode tahun 2018-2020 ditinjau dari aspek efisiensi

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi Universitas  
Memberikan sumbangan terhadap kajian pustaka bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas pengukuran kinerja dengan analisis dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten Balikpapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja kepada Pemerintah Kabupaten Balikpapan sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan

secara ekonomis dan efisien.

3) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

4) Peneliti Yang Akan Datang

Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

